



**LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (LKjIP)  
TAHUN 2019**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KOTA BANDA ACEH TAHUN 2020**



## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, dan hidayah-nya serta kekuatan sehingga kami telah dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Banda Aceh. Salawat dan salam kita sanjungkan kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan berilmu pengetahuan.

Penyusunan LKjIP ini sebagai media pertanggungjawaban keberhasilan dan atau kegagalan DPM-PTSP dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi sesuai Rencana Kinerja yang telah ditetapkan. Substansi LKjIP ini menginformasikan capaian kinerja DPM-PTSP dalam Tahun 2019, yang terkait dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2019 yang sekaligus merupakan laporan akuntabilitas kinerja DPMPTSP yang merupakan mata rantai capaian kinerja dari tahun-tahun sebelumnya.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 ini masih belum sempurna, namun kami terus berusaha untuk melakukan yang terbaik. Oleh karenanya kami sangat terbuka untuk menerima kritik dan saran yang membangun bagi penyempurnaan lebih lanjut untuk masa – masa mendatang. Akhirnya kami harapkan LKjIP ini akan bermanfaat untuk kita semua dan kami ucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 24 Februari 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh. ✚



**MUCLISH, SH**

Pembina Utama Muda/NIP. 19630109 199310 1 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Gambaran Umum SKPD .....	1
B. Sumber Daya Manusia .....	13
C. Struktur Organisasi.....	13
D. Sarana dan Prasarana.....	16
E. Maksud dan Tujuan.....	17
F. Sistematika Penyajian .....	17
<b>BAB II     PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>19</b>
A. Perencanaan Stratejik (Renstra) .....	19
B. Rencana Kerja Tahunan.....	20
C. Perjanjian Kerja .....	21
<b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>29</b>
A. Indikator Kinerja.....	29
B. Capaian Kinerja.....	29
C. Akuntabilitas Keuangan.....	60
<b>BAB IV    PENUTUP.....</b>	<b>64</b>

## IHKTISAR EKSEKUTIF

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh terbentuk sebagai perwujudan cita-cita Pemerintah Kota Banda Aceh untuk mewujudkan good governance dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyederhanaan birokrasi, sehingga terciptanya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan terutama dibidang Perizinan dan Nonperizinan.

Salah satu upaya untuk memacu laju pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan adalah melalui kegiatan Penanaman Modal, dimana Pemerintah Kota Banda Aceh melalui DPMPTSP Kota Banda Aceh melakukan perbaikan peningkatan iklim investasi dikota Banda Aceh agar memiliki daya tarik Penanaman Modal dalam negeri maupun Penanaman Modal Asing.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh ini disusun dengan tujuan memberikan informasi kinerja kepada Walikota Banda Aceh dan berbagai pihak yang berkepentingan atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai bagian dari upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh untuk meningkatkan kinerja.

Laporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh Tahun 2019 juga disusun melalui pengukuran data kinerja sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan hasil pengukuran kinerja dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. *Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh***

Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh sebagai institusi yang khusus bertugas memberikan pelayanan perizinan langsung kepada masyarakat pada dasarnya merupakan sebuah terobosan baru reformasi birokrasi atas inovasi manajemen Pemerintah Kota Banda Aceh. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh dibentuk untuk melaksanakan pelayanan perizinan yang mudah, cepat, transparan, terpercaya dan berkualitas kepada masyarakat. Pendirian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh didirikan berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 378 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh, dikuatkan dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh, dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) bersama Pemerintah Kota Banda Aceh dalam rangka pelaksanaan MPP Kota Banda Aceh dilaksanakan pada hari senin tanggal 28 Oktober 2019 dimana dimulainya terobosan baru sebagai pelayanan terhadap masyarakat dengan sebutan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang merupakan suatu perjalanan pembaharuan sekaligus suatu langkah strategis sebagai bentuk perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Tanggal 4 November 2019 DPMPTSP sudah beroperasi di pasar Aceh lantai III Kota Banda Aceh dan Soft Louching MPP dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2019 dengan pengguntingan pita oleh Prof. DR Diah Natalisa sebagai Deputi KemenpanRB Pelayanan Publik didampingi oleh Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh dan disaksikan oleh

unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopinda), mantan Menteri PANRB DR Azwar Abubakar (periode 2011-2014) dan Asdep KemenpanRB Ibu Noviana Andrina.

Konsep MPP merupakan collaborative governance yang ditawarkan sebagai solusi dari pelayanan terpadu yang terintegrasi antara pelayanan pusat dan daerah, sekaligus pelayanan swasta dalam satu tempat dimana kita hanya datang ke satu tempat untuk memenuhi semua kebutuhan kita. Maka MPP pada prinsipnya adalah mengintegrasikan semua pelayanan publik yang diperlukan masyarakat disatu tempat dengan ruang pelayanan yang nyaman dan didukung sarana penunjang lainnya sehingga waktu menunggu tidak lama dan membosankan.

Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Banda Aceh melayani 33 (tiga puluh tiga) counter layanan, 25 (dua puluh lima) Instansi, 131 (seratus tiga puluh satu) jenis layanan dan 12 (dua belas) Fasilitas publik.

**Tabel 1**  
**INSTANSI YANG BERGABUNG DI MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA BANDA ACEH**

NO	INSTANSI	PRODUK PELAYANAN	NOMOR COUNTER LAYANAN	JENIS LAYANAN	PETUGAS LAYANAN
1	2	3	4	5	6
<b>AREA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>					
1	Baitul Mal Kota Banda Aceh	Pelayanan ZIS	1	1. Layanan Penerimaan Setoran ZIS 2. Layanan Konsultasi & Informasi 3. Layanan PBB	Raudhah
2	Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh	Pajak dan Retribusi Daerah	2 dan 3	4. Layanan Pajak Daerah (NP/WD) 5. Layanan Informasi & Pengaduan	Merry Yuli
3	BPJS Ketenagakerjaan	Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	4	6. Pendaftaran Perusahaan Baru 7. Pengecekan Tunggakan Iuran 8. Layanan Informasi & Pengaduan	Saifullah
4	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh	Layanan pajak dan retribusi sampah	5	9. Layanan Retribusi Sampah 10. Layanan Kebersihan 11. Layanan Penyedotan Tinja 12. Layanan Pemasangan Perbaikan Lampu Jalan 13. Layanan Sewa Alat Berat 14. Layanan Sewa Taman Sari 15. Layanan Sampah Medis 16. Layanan Rekomendasi Lingkungan 17. Layanan Izin Magang Penelitian	Cut Nyak Candain
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh	Layanan Pembuatan Advice Planning	6	18. Advice Planning 19. Layanan Keterangan Situasi Bangunan	Deni Ivani, SE
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh	Layanan Perizinan dan Non Perizinan	7 8 9	20. Layanan IMB 21. Layanan Sicanalik Cloud 22. Layanan Sicanalik Cloud	

NO	INSTANSI	PRODUK PELAYANAN	NOMOR COUNTER LAYANAN	JENIS LAYANAN	PETUGAS LAYANAN
1	2	3	4	5	6
			10 11 12 13 14	23. Layanan Sicanik Cloud 24. Helpdesk OSS 25. Layanan Mandiri OSS 26. Layanan Mandiri OSS 27. Layanan Mandiri OSS	
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh	KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta Kematian	15	28. Layanan Kartu Tanda Penduduk (KTP); -Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Identitas Anak (KIA) 29. Layanan Surat Keterangan Pindah Datang 30. Layanan Surat Keterangan Pindah 31. Layanan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri 32. Layanan Surat Keterangan Tempat Tinggal 33. Layanan Surat Keterangan Lahir Mati 34. Layanan Surat Keterangan Kelahiran 35. Layanan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan 36. Layanan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian 37. Layanan Surat Keterangan Kematian 38. Layanan Surat Keterangan Pengangkatan Anak 39. Layanan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia 40. Layanan Surat Keterangan Pengganti Identitas 41. Layanan Surat Keterangan Catatan Sipil 42. Layanan Akta Kelahiran dan Akta Kematian 43. Layanan Akta Perceraian dan Perkawinan 44. Layanan Akta Pengakuan Anak 45. Layanan Akta Pengesahan Anak 46. Layanan Data Kependudukan	



NO	INSTANSI	PRODUK PELAYANAN	NOMOR COUNTER LAYANAN	JENIS LAYANAN	PETUGAS LAYANAN
1	2	3	4	5	6
<b>AREA PELAYANAN PUBLIK VERTICAL</b>					
8	Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh	Pelayanan Paspor	16	47. Layanan Pembuatan Paspor Baru 48. Layanan Pembuatan Paspor Penggantian 49. Layanan Pengaduan dan Informasi	Sartika Sari, SH Elizar Hafni, S.Si Dewi Putriana, S.Pdi
9	Kejaksanaan Negeri Kota Banda Aceh	E-Tilang Pelayanan Hukum	17	50. Pembayaran dan Pengambilan Barang Bukti Tilang 51. layanan Konsultasi Hukum Gratis	Zakwan, SH Ofdimur Heryadi Rizwan, SH
10	Samsat / PT. Jasa Raharja (Persero)	Pelayanan STNK	18	52. Layanan Pembayaran PKB 53. Layanan Perpanjangan STNK Tahunan 54. Layanan Pembayaran SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan)	
11	PT. TASPEN (Persero)	Pelayanan Taspen	19	55. Layanan Pengaduan dan Informasi 56. Pengajuan Berkas Iklim 57. Pengusulan Kartu Taspen 58. Otentikasi Peserta Pensiun 59. Informasi layanan iklim 60. estimasi hak peserta	cut mahfuz maidil ufah m isnaturrakhmi
12	PT. PLN (Persero)	Layanan Kelistrikan	20	61. Pembayaran Tagihan Listrik 62. Permohonan Pemasangan Baru 63. Permohonan Penambahan daya 64. layanan aplikasi PLN Mobile 65. Layanan Pengaduan dan Informasi	
13	BPJS Kesehatan	Jaminan Kesehatan Nasional	21	66. layanan pendaftaran baru peserta PBPJ (Mandiri) 67. layanan pendaftaran baru JKA (Jaminan Kesehatan Aceh) 68. Perubahan Data Kepesertaan Jaminan Kesehatan	Ridha

NO	INSTANSI	PRODUK PELAYANAN	NOMOR COUNTER LAYANAN	JENIS LAYANAN	PETUGAS LAYANAN
1	2	3	4	5	6
				Nasional (PBPU, PBI, dan PPU)	
				69. layanan perubahan status kepesertaan	
				70. layanan perpanjangan masa aktif kartu anak	
				71. layanan perubahan data	
				72. layanan pergantian kartu	Devi
				73. layanan perubahan faskes tingkat pertama	Mastura
				74. layanan pendaftaran bayi baru lahir	Faisal
				75. Layanan Pengaduan dan Informasi	
14	Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh (BPN)	Layanan Sertifikat		76. Layanan Informasi Pendaftaran Tanah	
			22	77. Layanan Informasi Nilai Tanah dan Properti	
				78. layanan pendaftaran pengembalian batas	
				79. layanan informasi aplikasi "Sentuh Tanahku"	
				80. layanan cek plot/plotting	
15	Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh	Layanan KUA		81. Layanan Haji	
			23	82. layanan pernikahan	
				83. layanan pengukuran arah kiblat	
				84. layanan wakaf	
				85. Layanan Pengaduan dan Informasi	
16	PDAM		24	86. Pembayaran Tagihan Air, Permohonan Pemasangan Baru, Pengaduan Kerusakan	Siti Azmatun
				87. layanan informasi	
17	DPMP TSP Aceh	Layanan Perizinan dan Non Perizinan	25	88. Layanan informasi & pengaduan	
18	Polresta Banda Aceh	Layanan Kepolisian	26	89. Layanan Perpanjangan SKCK	
				90. Layanan Laporan kehilangan	
				91. layanan informasi dan pengaduan	

NO	INSTANSI	PRODUK PELAYANAN	NOMOR COUNTER LAYANAN	JENIS LAYANAN	PETUGAS LAYANAN
1	2	3	4	5	6
19	PT. POS.Indoensia (Persero)	Pelayanan POS	27	92. layanan pengiriman (pos kilat khusus, pos.express dan pos online shop) 93. menerima pembayaran rekening listrik 94. menerima pembayaran angsuran kredit (multifinance) 95. menerima pembayaran pajak penerimaan negara dan penerimaan daerah 96. menerima pembayaran tagihan air (PDAM) 97. menerima pembayaran online shop 98. layanan penjualan materai 3000 & 6000 99. Layanan pendaftaran NPWP secara Online. 100. layanan pembuatan kode Billing 101. layanan informasi KSWP 102. Asistensi layanan mandiri 103. Konsultasi perpajakan 104. layanan informasi dan pengaduan 105. Layanan Penyetoran dan Penarikan 106. Layanan Pembukaan Rekening 107. Pembiayaan bagi usaha mikro 108. Pembukaan Rekening 109. Layanan Penyetoran dan Penarikan 110. penjualan kartu flazz BCA Syariah 111. Layanan Pengaduan dan Informasi 112. Layanan Pembukaan Rekening 113. Layanan cetak buku, ganti buku dan ganti kartu 114. layanan aktivasi mobile banking. 115. layanan aktivasi internet banking 116. layanan buka blokir mobile banking	Agus muni susanti
20	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh	Perpajakan	28		Padlan Afdhal
21	PT. LKMS Mahirah Muamallah	Layanan Perbankan dan pembiayaan bagi usaha mikro	29		
22	BCA Syariah	Layanan Perbankan	30		
23	Bank Central Asia (BCA)	Layanan Perbankan	31		Joni

NO	INSTANSI	PRODUK PELAYANAN	NOMOR COUNTER LAYANAN	JENIS LAYANAN	PETUGAS LAYANAN
1	2	3	4	5	6
				117. layanan ganti key BCA. 118. permohonan EDC 119. Layanan Penyetoran dan Penarikan 120. Layanan Pengaduan dan Informasi 121. Pembukaan Rekening 122. Layanan Penyetoran dan Penarikan 123. Menerima pembayaran (tilang, PLN, PDAM) 124. Layanan Pengaduan dan Informasi 125. Layanan Penyetoran dan Penarikan 126. menerima pembayaran PKB (pajak kendaraan bermotor) 127. pembukaan rekening/kartu ATM dll 128. menerima pembayaran / pembelian voucher pulsa dan wifi 129. menerima pembayaran pemerintah daerah 131. menerima pembayaran penerimaan negara	Lala
24	BRI	Layanan Perbankan	32		
25	PT. Bank Aceh	Layanan Perbankan dan pembayaran Retribusi Daerah	33		
<b>Jumlah Petugas Layanan</b>					



Jenis layanan yang dilayani di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh Tahun 2019 melayani :

**a. Pelayanan Perizinan**

1. Izin Usaha Perkebunan
2. Izin Usaha Tanaman Pangan
3. Izin Usaha Hortikultura
4. Izin Usaha Peternakan
5. Pendaftaran Usaha Perkebunan
6. Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan
7. Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura
8. Pendaftaran Usaha Peternakan
9. Izin Usaha Industri
10. Izin Usaha Kawasan Industri
11. Izin Perluasan .
12. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)
13. Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika
14. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)
15. Izin Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum
16. Izin Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum
17. Izin Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus
18. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang
19. Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan
20. Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau
21. Izin Pelabuhan Umum
22. Izin Usaha Angkutan Laut
23. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (Angkutan di Perairan)

24. Izin Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan
25. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan
26. Izin Mendirikan Rumah Sakit
27. Izin Toko Obat
28. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta
29. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
30. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK)
31. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvo Pastura Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung (IUPK Silvopastura)
32. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvo Fishery Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung (IUPK Silvo Fishery)
33. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) pada Hutan Produksi
34. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi
35. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung
36. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan hidup (SPPL)
37. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa
38. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
39. Izin Pelaksanaan Reklamasi
40. Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk nelayan kecil
41. Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil
42. Tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan
43. Tanda daftar usaha pergaraman bagi petambak garam kecil
44. Izin Usaha Jasa Konstruksi

45. Surat Izin Peil Banjir
46. Tanda Daftar Usaha Pariwisata
47. Izin Koperasi Simpan Pinjam
48. Surat Izin Usaha Perdagangan

**b. Izin Komersial**

1. Izin Operasi (IO)
2. Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau lintas antar propinsi dan/atau antar negara
3. Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan
4. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas
5. Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk dan/atau Reklamasi
6. Penetapan Terminal Khusus Yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri
7. Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter
8. Penetapan Trase Jalur Kereta Api Umum
9. Penetapan Trase Jalur Kereta Api Khusus
10. Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada SMK
11. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal
12. Sertifikat Produksi Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional
13. Sertifikat Produksi Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan PKRT
14. Izin Toko Alat Kesehatan
15. Izin Operasional Rumah Sakit
16. Izin Operasional Klinik
17. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus
18. Izin Apotek
19. Izin Toko Obat
20. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit
21. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

22. Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ)
23. Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil
24. Izin Pembuangan Air Limbah
25. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)
26. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)
27. Buku Kapal Perikanan
28. Izin Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun
29. Izin Pengubahan Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun
30. Pengesahan Pertelaan
31. Sertifikat HMRS a/n Developer
32. Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (HMSRS) a/n pembeli
33. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam
34. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam
35. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam
36. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
37. Tanda Daftar Gudang

**c. *Pelayanan Non Perizinan***

1. Rekomendasi Penimbunan Minyak (hanya sebatas mengeluarkan rekomendasi sedangkan izinnnya yang mengeluarkan DPMPTSP Propinsi).

**d. *Pelayanan Pengaduan***

1. Tingkatan Pengaduan Skala Kecil
2. Tingkatan Pengaduan Skala Menengah
3. Tingkatan Pengaduan Skala Besar

Susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan tata kerja Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh adalah :



1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi :
  - a. Kasubbag Program dan Pelaporan
  - b. Kasubbag Keuangan
  - c. Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset
3. Kepala Bidang Penanaman Modal, membawahi :
  - a. Kasi Promosi dan Pengembangan Penanaman Modal
  - b. Kasi Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
4. Kepala Bidang Pelayanan Pengaduan, Informasi dan Pelaporan, membawahi :
  - a. Kasi Pelayanan Informasi dan Pengaduan
  - b. Kasi Pengolahan Data, Pelaporan perizinan dan non perizinan
5. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, membawahi :
  - a. Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I
  - b. Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II

#### **B. Sumber Daya Manusia (SDM)**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh sampai dengan akhir tahun 2019 mempunyai SDM sebanyak 54 (lima puluh empat) orang dimana Pegawai Negeri Sipil 36 (tiga puluh enam) orang, 18 (delapan belas) orang pegawai Non Pegawai Negeri.

#### **C. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh Tahun 2019 terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas (Eselon II.b), Sekretaris (Eselon III.a), 3 (tiga) Kabag (Eselon III.a) dan 9 Kasubbag/ Kasie (Eselon IV.a) yaitu :

- a. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- b. Sekretaris

**c. Kabid**

- 1. Kabid Penanaman Modal**
- 2. Kabid Pelayanan Pengaduan, Informasi dan Pelaporan**
- 3. Kabid Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan**

**d. Kasubbag/Kasie**

- 1. Kasubbag Program dan Pelaporan**
- 2. Ksubbag Keuangan**
- 3. Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset**
- 4. Kasie Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan I**
- 5. Kasie Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan II**
- 6. Kasie Pelayanan Informasi dan Pengaduan**
- 7. Kasie Pengolahan Data, Pelaporan Perizinan dan Nonperizinan**
- 8. Kasie Promosi dan Pengembangan Penanaman Modal**
- 9. Kasie Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal**

**e. Staf**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh bertanggung jawab langsung kepada Walikota Banda Aceh. Sedangkan Sekretaris dan Kabid bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kasubbag bertanggung jawab kepada Sekretaris dan Kasie bertanggung jawab kepada Kabid sesuai dengan bidang tugasnya. Selanjutnya dibawah Kasubbag/ Kasie terdapat Staf dengan nomenklatur masing – masing staf bertanggung jawab kepada masing-masing Kasubbag/Kasie.

Perincian nomenklatur jabatan adalah sebagaimana Bagan Organisasi terlampir. Sedang perincian jumlah jenjang jabatan dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh dapat dilihat pada tabel berikut ini :